

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mahasiswa merupakan kelompok kecil dari generasi muda yang berkesempatan mengenyam pendidikan formal di perguruan tinggi. Ia memiliki peran dan tanggung jawab baik tanggung jawab ideologis sebagai pewaris utama perjuangan bangsa maupun tanggung jawab profesional yang dipersiapkan untuk menjadi ahli dalam bidang-bidang tertentu agar dapat berperan aktif dalam proses pembangunan.

Reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 mengidentifikasikan bahwa mahasiswa memiliki peranan *besar* dalam perwujudannya. Tidak terkecuali organisasi kemahasiswaan yang merupakan salah satu sarana penempatan individu mahasiswa dalam memberikan sumbangsuhnya terhadap kemampuan pergerakan mahasiswa di Indonesia. Sebagai calon-calon pembawa perubahan, mahasiswa diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mengefektifkan Ormawa sebagai sarana penyalur kemampuan mahasiswa (Ormawa), dimana salah satu caranya yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan melalui kegiatan-kegiatan didalamnya agar menjadi organisatoris yang handal yang mampu membawa perubahan baik diri sendiri, organisasi, lingkungan maupun bangsa dan negaranya.

Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah dan bagian integral warga negara, mahasiswa perlu memahami peranan kehidupannya. Amanat besar yang ada pada

pundak mahasiswa adalah *sebagai kekuatan moral* dan *sebagai kekuatan intelektual* yang selanjutnya berkedudukan sebagai *agent of change*. Hal tersebut tidak akan tercapai apabila proses pemberdayaan mahasiswa terhadap kedua amanat tersebut tidak dijalankan secara seimbang. Untuk mampu memainkan peranannya sebagai kekuatan moral dan kekuatan intelektual tersebut, perlu ada wadah yang menampung segenap potensi dan kreatifitas mahasiswa, sehingga dengan sendirinya akan mengarahkan mahasiswa mencapai dua peran dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Fenomena kehidupan dalam dunia kampus sangatlah beragam. Khususnya dalam kehidupan berorganisasi yang dilaksanakan oleh elemen-elemen tingkat organisasi di tingkat perguruan tinggi baik itu di tingkat jurusan, fakultas maupun universitas. Kesemuanya itu dituntut untuk lebih mampu bergerak dalam dunia kemahasiswaan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak bagi kemampuan ataupun potensi yang dimiliki setiap mahasiswa. Aktivitas yang dilakukan oleh setiap mahasiswa dalam kegiatan berorganisasi sangat bermanfaat dan memiliki kebergunaan yang efektif, baik itu untuk diri pribadi mahasiswa itu sendiri ataupun masyarakat umumnya. Mahasiswa sebagai aktor intelektual yang diharapkan mampu untuk berpikir secara jernih dalam berbagai hal memiliki dua peran dalam melaksanakan fungsinya, baik itu dalam kegiatan kemahasiswaan ataupun kegiatan perkuliahan sehari-hari dikampus.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia dari semua itu maka diperlukan keaktifan dari para *calon-calon pembawa perubahan* ini untuk lebih membuka wawasan dan kemampuan ataupun skill mereka tidak hanya

melalui pembelajaran kuliah dikampus semata, melainkan melalui kegiatan serta keaktifan serta aktivitasnya di organisasi (dalam hal ini organisasi kemahasiswaan), hal tersebut merupakan proses pembelajaran dan pendidikan politik mahasiswa sehingga dari pembelajaran tersebut mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman politik yang baik

Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar ia mendapat informasi, wawasan, dan keterampilan politik sehingga sanggup bersikap kritis, dan lebih intensional terhadap hidupnya. Selain itu, bisa menjadi warga negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa pengarahan di tengah kancah politik. Selanjutnya pendidikan politik sanggup mengadakan orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya. Dengan demikian, pendidikan politik mendorong orang untuk melihat diri sendiri dan lingkungannya dengan cara yang lain, lalu berbuat lain, menuju eskalasi diri, dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Pendidikan politik sifatnya tidak boleh indoktrinatif. Pendidikan politik yang indoktrinatif (secara formal) akan menyebabkan orang menjadi kaku, fanatik, sempit pandangan, mentalnya menjadi dungu dan kacau karena perilakunya sering menentang hati nurani sendiri dan realitas yang dihadapi juga menentang realitas kehendak dan aspirasi umum.

Penelitian yang dilakukan Suparman (2005) mengenai pendidikan politik dalam kaitannya dengan partisipasi politik mahasiswa menghasilkan kesimpulan bahwa:

pendidikan politik berperan untuk mensosialisasikan nilai-nilai politik yang dikandung sistem politik yang ideal. Melalui ini mahasiswa akan

mempunyai standar penilaian terhadap sebuah sistem politik, dimana yang secara formal ditingkat tinggi yang memiliki bobot paling besar tentang materi pendidikan politik ; pendidikan Pancasila. Untuk itu pendidikan politik senantiasa bermuatan nilai-nilai yang diharapkan oleh sebuah sistem politik yang ideal, sehingga mereka dapat menginternalisasikan dalam kepribadiannya. Dengan demikian hasil dari penginternalisasiannya itu akan mendorong dan melahirkan tingkah laku politik yang mendukung sistem politik yang dicita-citakan.

Hal ini menunjukkan betapa strategisnya peranan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik, agar pendidikan politik dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya, maka pendidikan politik menuntut diberikannya informasi-informasi yang dapat merangsang wawasan sosial, sehingga dapat membuka cakrawala berfikir setiap anggota masyarakat yang pada gilirannya dapat menseleksi mengenai hal-hal yang dapat mendukung, kepada kehidupan yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat.

Jika pendidikan politik dilakukan dengan baik dan sistematis maka akan tumbuh kekuatan-kekuatan kontra yang demokratis dan positif, yaitu merupakan kekuatan yang kritis melawan kondisi situasi yang tidak sehat, tidak mantap, dan tidak wajar. Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan bangsa dan negara.

Partisipasi politik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau warga negara secara pribadi untuk mempengaruhi proses pembuatan dan

pelaksanaan kebijakan umum dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintah. Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik (Miriam Budiardjo, 1985:161). Partisipasi politik adalah proses mobilisasi warga negara ke dalam kehidupan dan kegiatan politik. Ini menunjukkan bahwa kegiatan mahasiswa dalam Ormawa juga merupakan bentuk partisipasi politik mahasiswa. Hal ini lebih dikarenakan Ormawa juga merupakan organisasi yang didalamnya mempelajari politik secara keseluruhan seperti pemilihan ketua organisasi, demonstrasi, kajian-kajian politik, dan lain-lain.

Disadari atau tidak kehidupan manusia sebagai individu atau kelompok yang berada dalam satu komunitas akan terlibat dalam kehidupan politik. Politik telah mempengaruhi kehidupan semua orang terlepas dari apakah mereka terlibat dalam proses politik atau hanya sekedar pelaksana dan dilibatkan semata. Pemahaman terhadap masalah-masalah dan fenomena kehidupan politik masyarakat yang telah berlangsung merupakan bagian dari kepedulian dan rasa tanggung jawab seseorang terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Soltou (Muchtari Affandi, 1997 : 65) bahwa : “... *politics is the concern of everybody with any sense of responsibility...*”.

Pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai politik sangat diperlukan untuk memperoleh pengalaman tentang hal apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan politik saat itu dan juga merupakan faktor penting untuk memahami masalah kehidupan politik. Hal itu akan mempengaruhi pendapat dan penilaian seseorang terhadap masalah-masalah politik yang timbul dan berkembang di

masyarakat. Pengetahuan dan wawasan tentang politik tersebut tidak hanya terbatas yang diperoleh dari bahan dan sumber yang sifatnya formal yang dinilai dapat memberikan informasi dan pengetahuan, misalnya dari hasil belajar di sekolah dan kuliah umumnya. Akan tetapi terlepas dari hal itu, sumber wawasan dan pengetahuan mengenai masalah-masalah politik juga dapat diperoleh dari organisasi.

Dalam hal inilah dibutuhkan pendidikan politik yang mampu menempa mahasiswa dalam berkarya. Dimana dengan berorganisasi mahasiswa memperoleh pengetahuan dan wawasannya mengenai masalah-masalah politik baik dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi itu sendiri ataupun mengamati fenomena politik yang terjadi di masyarakat. Selain itu, hal itu juga merupakan proses pembelajaran dan pendidikan politik yang baik bagi mahasiswa.

Sejumlah peristiwa politik, perilaku elite politik, dan partai politik yang buruk adalah kenyataan politik Indonesia. Ketiga hal tersebut sesungguhnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah mendidik watak politik warga negara. Selain itu, lingkungan kampus tidak jarang sering dijadikan sebagai tempat aktivitas politik dalam berbagai hal. Sudah banyak berita yang mengetengahkan sikap perguruan tinggi yang menolak kampanye dan aktivitas politik di kampus. Sebagian suara para akademisi kampus sebenarnya mencerminkan keinginan masyarakat perguruan tinggi untuk dapat bersikap netral. Masyarakat banyak yang mempertanyakan hal ini, mengapa perguruan tinggi terkesan alergi berbicara soal politik? Bukannya kampanye dan aktivitas

politik lainnya merupakan bagian pendidikan politik masyarakat kampus, agar dosen, mahasiswa, dan karyawan tidak salah dalam menentukan pilihan dan dapat menumbuhkan kesadaran politik.

Aneka pertanyaan itu ada benarnya. Tetapi, kampanye bukan satu-satunya proses untuk masyarakat kampus mendapatkan pendidikan politik. Artinya, ada banyak cara yang bisa dilakukan warga kampus untuk bisa “melek” politik. Belum lagi jika dilihat bahwa definisi politik tidak hanya terbatas pada persoalan pemilu dan kampanye saja, tetapi menyangkut kepedulian seseorang terhadap nasib bangsa. Oleh karena itu, persoalan nasib bangsa begitu beragam maka kemudian tidak bisa dengan serta merta mengatakan perguruan tinggi yang tidak mau peduli terhadap nasib bangsa. Dalam hal ini, justru kampus sebagai tempat yang strategis dalam mentransformasikan pendidikan politik. Para intelektual kampus dapat pula berperan sebagai pihak yang menjembatani pendidikan politik kepada masyarakat.

Dalam kaitan pendidikan politik dalam ormawa ini, hasil penelitian Hermawan (2003) melakukan penelitian dengan Fokus kajian yang menyoroti tentang pendidikan politik dalam kaitannya dengan perilaku politik pimpinan mahasiswa dalam ormawa, ia menjelaskan bahwa:

Pemahaman mahasiswa mengenai konsep pendidikan politik terakumulasi melalui proses sosial yang kontinyu dan diwarnai oleh faktor-faktor lingkungan sosial yang beragam. Proses pendidikan politik (sosialisasi politik) mulai tertanam pada lingkungan keluarga, di sekolah, pemberitaan media massa, dan keaktifan pada Ormawa. Ormawa merupakan pusat dan wahana yang strategis dalam pembentukan kepribadian, sikap dan perilaku mahasiswa. Perkembangan dan kematangan berinteraksi sosial, emosional, dan personal terpupuk dan terasah melalui realitas berorganisasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut menghasilkan data bahwa: *Pertama*, pemahaman mahasiswa mengenai konsep pendidikan politik sangat beragam, dan berdasar daya nalarnya sendiri, serta nilai-nilai kehidupan dan sistem keyakinan yang dianut secara operasional ditunjukkan dalam aktivitas berorganisasi dan pergerakan sosial. Pemahaman itu terfokus pada persoalan yang menyentuh kehidupan banyak orang dan bersifat problematis.

Kedua, profil perilaku politik mahasiswa tercermin dari kompetensi mereka dalam keorganisasian, kepemimpinan dan pergerakan sosial. Potensi itu berkembang diwujudkan dalam interaksi dan komunikasi sosial diantara mahasiswa dan tokoh-tokoh pimpinan nasional dalam bentuk : forum diskusi, latihan kepemimpinan, persidangan/musyawarah mahasiswa, rapat dengar pendapat; pernyataan sikap, orasi dan unjuk rasa yang melibatkan massa.

Ketiga, komunikasi dan interaksi antara mahasiswa baik dalam organisasi intra maupun ekstra universiter, secara formal maupun informal, membina kesadaran berpolitik dan membangun opini publik, serta melahirkan kepekaan, kepedulian, dan keterlibatan (partisipasi) mereka terhadap problema sosial yang dihadapi dalam kehidupan kemasyarakatan, kelembagaan, dan kenegaraan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kesadaran politik mutlak diperlukan dan harus ditanamkan pada setiap warga negara dalam pembangunan karena dengan memiliki kesadaran politik, seorang warga negara dapat berpartisipasi dalam politik atau dalam pembangunan secara keseluruhan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat R. Subakti (Sudijono Sastroatmodjo, 1995:90-91) bahwa: "...dua faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang

terhadap pemerintah, yaitu kesadaran politik seseorang dan kepercayaan politik seseorang terhadap pemerintah”.

Dari pengertian tersebut, dapat diungkapkan apabila individu memiliki kesadaran politik maka tanpa adanya anjuran, paksaan dari pemerintah atau penguasa, seseorang akan dapat berpartisipasi dalam politik atau dalam pembangunan secara keseluruhan. Dilihat sebagai bagian dari generasi muda maka mahasiswa diharapkan menjadi penerus dan harapan bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Atas keberadaannya sebagai bagian dari generasi muda atau usia remaja, Alfian (1981:235) mengatakan bahwa “usia remaja dan muda mungkin dianggap sebagai masa-masa yang menentukan dalam proses sosialisasi politik seseorang karena pada waktu itu corak sikap dan tingkah lakunya sudah mulai mengeras”.

Berdasarkan pendapat tersebut, keberadaan mahasiswa dinilai sangat penting sebagai suatu masa yang dijalani oleh individu dalam mengembangkan dirinya, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga dapat terbentuk kesadaran politik yang akan direalisasikan dalam partisipasi politik ataupun perilaku politiknya setelah ia dewasa. Dalam kaitan tersebut, kepercayaan, nilai, dan pengharapan politik yang diperoleh pada masa kanak-kanak akan mempunyai implikasi bagi perilakunya setelah ia dewasa”.

Dengan demikian, tepatlah jika mahasiswa yang merupakan bagian dari usia remaja sangat penting dan perlu mendapatkan pendidikan atau pengetahuan politik. Hal tersebut dikarenakan tingkat kebutuhan terhadap informasi politik berbeda dengan orang dewasa serta tingkat kognisi mahasiswa dalam mencerna

informasi politik. Dari hal tersebut, kita mengetahui bahwa bagaimana pentingnya masalah-masalah politik yang selalu menggejala dan menjadi perhatian masyarakat sekaligus menjadi pendidikan politik mahasiswa untuk dapat meningkatkan partisipasi politik mahasiswa itu sendiri.

Didasari oleh alasan-alasan pentingnya pendidikan politik, partisipasi politik dan keberadaan mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang “ Pengaruh Pendidikan Politik Di Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa: studi deskriptif terhadap mahasiswa GMNI dan HMI “

1.2. Rumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: Seberapa besar pengaruh pendidikan politik di organisasi kemahasiswaan terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa?

Dari rumusan masalah tersebut diidentifikasi menjadi beberapa pertanyaan penelitian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh *Bildungswissen* (bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*mensbeeld*) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri) dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa ?
- 2) Seberapa besar pengaruh *Orientierungswissen* (harus berani melihat realitas nyata dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi-kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan, noda dan unsur destruktif lainnya) dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa ?
- 3) Seberapa besar pengaruh *Verhaltungswissen* (memahami hukum, norma, tata tertib dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik) dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa ?
- 4) Seberapa besar pengaruh *Aktion-wissen* (Sanggup merefleksikan peristiwa-peristiwa politik dan membuahkan ide-ide dan aksi atau tindakan yang tepat untuk

mengatasi semua kesulitan) dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud penelitian

Maksud penelitian ini ialah untuk mengkaji secara kuantitatif variabel pendidikan politik serta pengaruh dari variabel tersebut terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini ialah :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Bildungswissen dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Orientierungswissen dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Verhaltungswissen dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa.
- 4) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Aktion-wissen dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Secara teoritis dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh pendidikan politik dalam Ormawa terhadap tingkat partisipasi politik.

- 2) Diharapkan dapat menjadi masukan pengembangan pembelajaran ilmu politik dalam memberikan pendidikan politik yang efektif guna meningkatkan partisipasi politik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini diharapkan menjadi penunjang untuk melatih kemampuan berpikir dan bersikap ilmiah dalam mencari penjelasan dari berbagai fenomena politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- 2) Secara praktis bagi media mahasiswa atau masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan wacana baru serta masukan dalam mendukung kehidupan politik yang lebih demokratis, bertanggung jawab, dan bermartabat khususnya di kalangan mahasiswa atau Ormawa.

1.5. Kerangka pemikiran dan Hipotesis

1.5.1. Kerangka Pemikiran

1.5.1.1. Pendidikan Politik

Konsep pendidikan politik dan sosialisasi politik, memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian. Merujuk pada pengertian pendidikan politik, Rush dan Althoff (1986:22)

menganggap bahwa sosialisasi politik ialah sebagai suatu proses, oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik tergantung dari lingkungan tempat individu tinggal maupun kepribadian dari individu tersebut seperti yang diungkapkan oleh Rush dan Althoff (2002:27) bahwa sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu-individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Sosialisasi politik sebagai suatu proses belajar tentang politik (*political learning*), di dalamnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Persoalan pokok sosialisasi politik adalah bagaimana seseorang menjadi paham akan politik.

Selain dengan beberapa prinsip itu, dalam proses belajar politik (*political learning*) terdapat sumber atau agen atau sarana-sarana sosialisasi politik. Almond (1974:47-49) menyebutkan adanya beberapa agen sosialisasi politik, seperti keluarga, sekolah, kelompok, pergaulan, pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung. Pentingnya agen-agen atau sarana-sarana sosialisasi politik, sangat bergantung pada intensitas interaksi individu dengan agen-agen atau sarana-sarana, proses komunikasi, penekunan, dan usia seseorang. Dengan berdasarkan pada pendapat Allen Beck, hal tersebut dikemukakan oleh Haryanto (1983:34) :

Besar tidaknya peranan sarana-sarana tersebut bergantung pada tingkat intensitas interaksi individu dan sarana yang ada, proses komunikasi yang berlangsung antara individu dengan sarana tadi, tingkat atau derajat penekunan individu yang mengalami proses sosialisasi politik, dan umur individu yang bersangkutan.

Menurut Supriadi (1999:70) Karena kata pendidikan politik dan dan kata sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama maka dapat digunakan secara bergantian. Alfian (1981:235) juga menganggap bahwa adanya keeratan hubungan antara pendidikan politik dan sosialisasi politik sehingga ia mengatakan bahwa: "Adapun sosialisasi politik ini dapat dianggap sebagai pendidikan politik dalam arti yang longgar".

Mengenai pengertian dari pendidikan politik dalam arti kata yang lebih ketat, Alfian (1981:235) mengatakan : "dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk megubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak di bangun". Hal serupa juga dinyatakan oleh Kartini Kartono (1996:64) bahwa :

"pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik".

Rusadi Kartaprawira (1988:54) memandang bahwa pendidikan politik yaitu sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Dalam kaitan pendidikan politik ini, A. Kosasih Djahiri (1995 :18) menyatakan bahwa:

Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga negara suatu negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada.

Dalam Inpres No:12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda (1982:2) dijelaskan bahwa:

Pada prinsipnya pendidikan politik bagi generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien.

Dihubungkan dengan tujuan pendidikan politik untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran politik sehingga terjadi pembaharuan kehidupan politik dalam rangka menciptakan suatu sistem politik yang demokratis, Sherman (Idrus Affandi 1996:26) melihat sosialisasi politik dalam tiga perspektif, Yakni perspektif konsensus, perspektif konstruksi sosial tentang realitas dan perspektif humanisme. Rusadi Kantaprawira (1988: 54) memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

Dalam kaitan itu Idrus Affandi (1996:27) mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasinya dalam menyalurkan tuntutan dan dukungan.

Dalam hal ini, pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Giesecke (1971:21) memberikan batasan tentang pendidikan politik yaitu berupa:

a. *Bildungswissen:*

Yaitu bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*mensbeeld*) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri, sehingga:

- 1) Orang menjadi sadar akan kekuatan pribadi dan kemampuan bangsa sendiri.
- 2) Sadar akan identitas bangsa sendiri.
- 3) Memiliki rasa percaya diri yang kuat dan sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri (*minderwaardigheidscomplex*) serta rasa ketergantungan pada kekuatan atau bangsa lain;
- 4) Memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa

b. *Orientierungswissen:*

Yaitu mampu berorientasi pada paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Secara objektif orang harus berani melihat realitas nyata dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi-kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan, noda dan unsur destruktif lainnya. Sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang lebih baik, dan orang bisa keluar dari bermacam jalan buntu (*impasse*), menuju pada keseimbangan dan keserasian hidup bersama.

c. *Verhaltungswissen:*

Yaitu memahami hukum, norma, tata tertib dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subjek menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana dalam menanggapi situasi kondisi politik sesaat. Caranya adalah:

- 1) Mampu mengendalikan tingkahlaku sendiri atas pertimbangan hati nurani yang murni;
- 2) Sehingga orang tidak menjadi salah tingkah dan tidak egois-egosentris dan mau menjunjung tinggi prinsip kesusilaan.

d. *Aktionwissen:*

Yaitu memiliki prinsip kebenaran dan keadilan yang universal. Sanggup merefleksikan peristiwa-peristiwa politik dan membuahkan ide-ide dan aksi atau tindakan yang tepat untuk mengatasi semua kesulitan. Caranya adalah:

- 1) Mampu bertindak laku tepat, cermat, dan benar serta di dukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan;
- 2) Mampu bersikap objektif;
- 3) Memiliki wawasan yang kritis.

Sedangkan Kartini Kartono (1996:68) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan politik ialah:

- 1) Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya) :
 - Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik.
 - Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.
 - Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.

- Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
- 2) Memperhatikan dan mengupayakan :
- Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/ aktualisasi diri dari dimensi sosialnya)
 - Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik)
 - Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Antara fungsi pendidikan politik dan tujuan dari pendidikan politik mempunyai kedekatan tersendiri yang tak dapat dipisahkan dan keberhasilan pencapaian fungsi dan tujuan dari pendidikan politik merupakan keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan politik itu sendiri.

Pendidikan politik tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara nyata di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan politik tentunya akan berkaitan erat dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Dengan demikian, bentuk pendidikan politik mana yang akan diterapkan dalam mendukung terlaksananya pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan suatu negara, pada umumnya pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam sebuah negara.

Bentuk pendidikan politik itu sendiri menurut Kuntomijoyo (1994: 58) mengatakan sebagai berikut :

Pendidikan politik formal, yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi. Berikutnya adalah pendidikan politik yang diselenggarakan tidak melalui pendidikan formal, seperti pertukaran pemikiran melalui mimbar bebas. sedangkan pendidikan politik yang baik

adalah pendidikan politik yang memobilisasi simbol-simbol nasional, seperti sejarah, seni sastra, dan bahasa.

Menurut Djohermansyah Djohar (X:1999) menjelaskan dimensi dari pendidikan politik, yaitu : “Pola pendidikan politik yang hendak dirancang paling tidak mencakup empat dimensi strategis, yaitu : dimensi ideologis, dimensi struktural, dimensi prosedural, dimensi behavioral”.

Dimensi ideologis terpusat pada satu aspek yang sangat mendasar, yaitu pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai politik. Dimensi struktural mengacu pada penyertaan masyarakat dalam lembaga-lembaga resmi, pembentukan lembaga independen sebagai penyelenggara pemilu, pemberdayaan lembaga perwakilan rakyat, penguatan lembaga MPR, pengurangan peranan TNI, dan peniadaan restriksi jumlah partai. Dimensi prosedural, meliputi penetapan proses, prosedur, dan tata cara kehidupan politik yang lebih menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Sedangkan Dimensi behavioral, yang tercermin dari pengaturan tingkah laku politik warga negara yang membuka ruang bagi kebebasan, kompetisi, partisipasi, dan kedamaian dalam menunaikan hak-hak politik serta menjalankan kegiatan politik sehari-hari.

Secara formalnya maksud diadakannya pendidikan politik menurut Inpres No:12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda (1982:5) ialah:

memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

1.5.1.2. Organisasi Kemahasiswaan (ormawa), Mahasiswa dan Politik

Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian. Ditinjau dari kedudukannya ormawa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ormawa Intra-Perguruan Tinggi dan ormawa Antar Perguruan Tinggi. Ormawa Intra-Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan kecendikiaan, daya intelektualitas, mengembangkan bakat dan minat, serta memupuk integritas kepribadian dalam rangka pencapaian tujuan perguruan tinggi. Ormawa Antar-Perguruan Tinggi bertujuan meningkatkan kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan dan profesi bidang studi serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan.

Ormawa di perguruan tinggi merupakan salah satu komponen dari system akademis yang kontribusinya diajukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian mahasiswa secara mantap dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta memiliki tanggung jawab pribadi dan social serta kebangsaan.

Ormawa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan tinggi. Oleh karena itu keberadaan ormawa menjadi unsur penunjang Tri Darma Perguruan Tinggi., yaitu sebagai wahana menyalurkan aspirasi, motivasi, dan merealisasikan diri dalam kegiatan organisasi pada tingkat jurusan, fakultas, dan tingkat universitas.

Ada dua jenis organisasi Kemahasiswaan, yaitu Organisasi Kemahasiswaan Intra-Perguruan Tinggi dan Organisasi kemahasiswaan Antar-Perguruan Tinggi :

- a. Organisasi Kemahasiswaan Intra-Perguruan Tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi (Kepmendikbud No. 155/U/1998).
- b. Organisasi kemahasiswaan Antar-Perguruan Tinggi adalah wahana dan sarana meningkatkan kerja sama pengembangan ilmu dan profesi bidang studi serta menjalin persatuan dan kesatuan.

Faktor-faktor pendorong mahasiswa untuk terjun ke dunia politik tidaklah terlepas dari unsur-unsur penyebab politik angkatan muda. Perbedaan nilai antara generasi muda dengan generasi tua mendorong terbentuknya generasi muda sebagai kekuatan politik di Indonesia.

Bagi partai politik, perkembangan jumlah mahasiswa dilihat sebagai kekuatan yang potensiil. Oleh karena itu menjelang pemilihan umum 1955 partai-partai politik meningkatkan kegiatannya di kalangan mahasiswa dalam rangka memperoleh dukungan. Hal ini sering menimbulkan masalah baru bagi universitas, sebab sejak saat itu percaturan politik pusat maupun daerah mulai memasuki kampus. Tumbuhnya pengotakan mahasiswa yang berdasarkan ideologi, yang mempertajam ikatan-ikatan kesukuan, agama, daerah dan sebagainya.

Akan tetapi bagi generasi muda langkah-langkah di atas merupakan langkah awa; untuk berkiprah dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Karakteristik mahasiswa sendiri merupakan pendorong bagi mahasiswa untuk meningkatkan peranan mereka di dalam kehidupan politik angkatan muda. Karakteristik tersebut antara lain:

Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa memiliki wilayah horizon yang luas di antara keseluruhan untuk lebih mampu bergerak di antara lapisan masyarakat. Kedua, sebagai kelompok yang paling lama menduduki bangku sekolah, mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi yang terpanjang di antara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise di dalam masyarakat, dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda. Karena mahasiswa pada umumnya memiliki pandangan yang lebih luas dan jauh ke depan dibandingkan dengan angkatan muda lainnya. Kelima, meningkatnya kepemimpinan mahasiswa di kalangan angkatan muda tidak terlepas dari perubahan kecenderungan orientasi universitas.

Mahasiswa sebagai komponen universitas mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam pemikiran, pembicaraan, dan penelitian tentang masalah-masalah sosial dan politik. kesempatan ini tidak dimiliki oleh angkatan muda lainnya. Oleh karena itu, walaupun sering berubah-ubah namun mahasiswa termasuk yang

terdepan di dalam memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara nasional.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa generasi selain potensial dari segi kuantitas juga potensial dari segi kualitas yang masih idealis. Hal ini juga yang menjadi penting untuk meneliti partisipasi pemuda khususnya pemilih pemula untuk meningkatkan dukungan bagi partai politik.

1.5.1.3. Partisipasi Politik

Banyak ilmuwan yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai suatu kegiatan sukarela yang dilakukan oleh rakyat biasa untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh penguasa. Senada dengan hal tersebut, Sudjono Sastroatmodjo (1995:67) memberikan definisi partisipasi politik sebagai berikut:

“Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah”.

Dipihak lain, Miriam Budiardjo (1982:1) secara umum mengartikan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah:

“kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)”.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Ramlan Surbakti (1992:140) mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sedangkan Rush dan Althop (2003:123) mendefinisikan partisipasi politik adalah

keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan didalam system politik. Selain Rush dan Althop, ada pula beberapa pakar politik lain yang merumuskan definisi partisipasi politik, seperti yang dikutip Miriam Budiardjo (1994:183) diantaranya adalah: Huntington Dan Nelson, memberikan batas partisipasi politik yang diantaranya meliputi:

Pertama, mengartikan partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap.

Kedua, yang dimaksudkan dalam partisipasi politik itu adalah warga Negara (preman) biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah.

Ketiga, kegiatan partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Keempat, partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal.

Kelima, partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak langsung.

Sebagai suatu kegiatan, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Menurut **Ramelan Surbakti** (1992 : 142), bentuk partisipasi politik antara lain sebagai berikut :

“Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga Negara, mengajukan alternative kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan sarana kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemerintah daerah. Di pihak lain partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan mentaati perintah/peraturan, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.”

Bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya dapat dikategorikan menjadi dua, yakni partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Lebih lengkap Muller (Sudijono Sastroatmodjo 1995 :77) menjelaskan bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya, yaitu sebagai berikut :

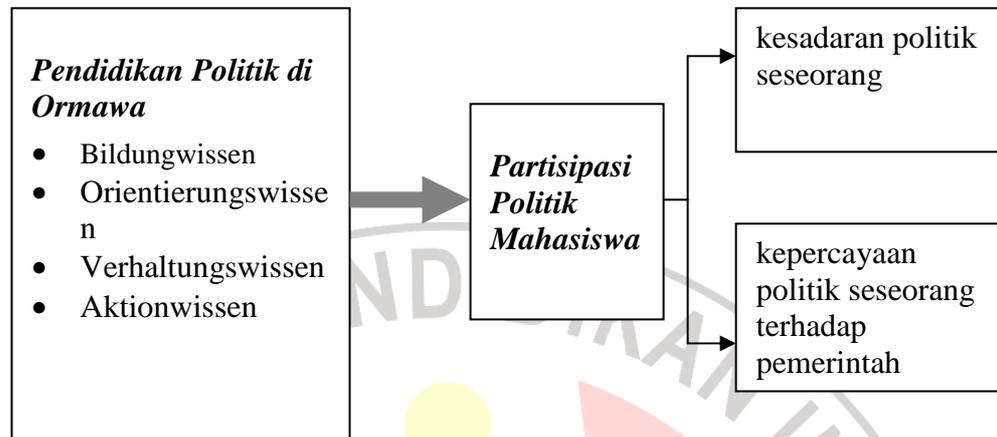
“Partisipasi individual berwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan dan keluhan kepada pemerintah. Maksud partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga Negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilihan umum.”

Partipasi politik merupakan bentuk tingkah laku baik menyangkut aspek sosial maupun politik. Tindakan-tindakan dan aktivitas politik tidak hanya menyangkut apa yang telah dilakukan saja, tetapi juga menyangkut hal-hal apa yang mendorong individu berpartisipasi. Artinya motif-motif yang telah mendorong individu untuk berpartisipasi. Hal itu penting, karena tindakan-tindakan politik itu memiliki kaitan dengan partisipasi politik itu sendiri.

Partipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam intensitas dan bentuknya. Hal itu disamping berkaitan dengan sistem politik, juga berhubungan dengan perubahan social yang terjadi dalam masyarakat. Meluasnya partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal. **Weimer** (Sudijono Sastroatmodjo, 1995: 89) menyebutkan lima hal yang mempengaruhi partisipasi politik warga Negara yang diantaranya adalah sebagai berikut:

“Pertama, ialah modernisasi. Kedua, terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas social. Ketiga, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi politik. Keempat adalah konflik diantara para pemimpin politik. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan social, ekonomi dan kebudayaan.

Gambar 1
Model Kerangka Berfikir Pengaruh Pendidikan Politik Mahasiswa
Di Ormawa Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa



1.5.2. Hipotesis

1.5.2.1. Hipotesis mayor

Semakin tinggi pengaruh pendidikan politik di organisasi kemahasiswaan terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik mahasiswa.

1.5.2.2. Hipotesis Minor

- 1) Semakin tinggi pengaruh *Bildungswissen* dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik mahasiswa.
- 2) Semakin tinggi pengaruh *Orientierungswissen* dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik mahasiswa.

- 3) Semakin tinggi pengaruh *Verhaltenswissen* dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik mahasiswa.
- 4) Semakin tinggi pengaruh *Aktionwissen* dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik mahasiswa.

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Sekretariat Himpunan MAHASISWA Islam (HMI) Koordinator Komisariat UPI dan Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UPI. Waktu penelitian selama 6 bulan yang dibagi menjadi bagian-bagian tertentu dan melewati beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1
Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan	Waktu penelitian					
	2008					
	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt
Studi Pustaka/ Studi Awal	X	X				
Usulan Penelitian		X				
Penelitian Lapangan			X			
Pengolahan Data				X		
Penulisan Skripsi					X	X